

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 215-239.
- Ambarwati, S. I. (2014). Implikasi Penerapan Pmk Nomor 163/Pmk.03/2012 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Karanganyar. Karya Tulis Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Azmi, M. R. (2015). Perbandingan Penerimaan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri KPP Pratama Karanganyar Tahun 2011 Dengan 2013. Karya Tulis Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Bahtiar, I. (2015). Analisis Pemberlakuan Pmk Nomor 163/Pmk. 03/2012 Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (Tahun 2010-2014). Karya Tulis Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangarepan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Goin Concern: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II), 78-87.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144-159.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Inasius, F. (2012). Analisis PPN Membangun Sendiri Untuk Pengusaha Kena Pajak Di Indonesia. *Binus Business Review*, 3(1), 15-25.
- Irawan, F. (2022). Riset kuantitatif dan kualitatif penghindaran pajak: Metode apa yang tepat untuk indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 16-24.

- Jafar, W. A. (2022). Wajib Pajak; Asas, Manfaat, dan Legalitasnya Dalam Hukum Islam. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 10(2).
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Inovasi*, 12(2), 270-280.
- Khaesarani, I. R. (2021). Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa. *Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya*, 15(3), 37-49.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kodus. *Journal of Management*, 2(2).
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Masyitah, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 89-104.
- Nizam, A. R. (2020). Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Terhadap Subjek Pajak Kegiatan Perusahaan Tambang Minyak Asing Di Indonesia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Oelangan, M. D. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 26774.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Pramiyati, T., Jayanta, & Yullnelly. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara, 11(1). *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 35-40.
- Sa'adah, N. (2009). Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan). *Majalah Masalah-Malasah Hukum*, 38(4), 342-349.
- Sadipun, Y. (2019). Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Beauty Kasatama di Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Darma Cendika).
- Sa'diyah, I. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-BM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah (Voll)*. UMMPress.
- Subroto, G. (2004). Alternatif Penerapan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Sebagai Perwujudan Keadilan Pajak dan Penghindaran

Pajak Berganda. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

Wijaya, S., & Taqiyyuddiin, M. H. (2021). *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: PERLUKAH BATASAN PKP UNTUK WAJIB PAJAK BADAN?* GUEPEDIA.

Yuesti, A., Prananta, N. G., & Bhegawan, D. A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.